

## PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA (BPRSW) YOGYAKARTA DALAM MENANGANI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

### *THE ROLE OF WOMAN PROTECTION AND SOCIAL REHABILITATION HOUSE (BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA/BPRSW) YOGYAKARTA IN HANDLING SOCIO-ECONOMIC VULNERABLE WOMAN*

Oleh : Noor Yuli Astuti dan Poerwanti Hadi Pratiwi, S.Pd.,M.Si

Email : [astutinooryuli@yahoo.com](mailto:astutinooryuli@yahoo.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta dalam menangani WRSE beserta faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE dilakukan dengan memberikan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial. Perlindungan sosial dilakukan dengan mempertimbangkan siapa yang boleh berkunjung, pembatasan jam kunjung, penentuan tempat kunjung, control dalam penggunaan HP dan kerahasiaan identitas WRSE. Peran dalam rehabilitasi social diwujudkan dalam bimbingan fisik, mental, social dan keterampilan. Setelah selesai mendapatkan bimbingan tersebut WRSE akan melakukan PBK (Praktek Belajar Kerja). BPRSW Yogyakarta memiliki program bimbingan lanjut yaitu program sertifikasi bagi alumni BPRSW Yogyakarta. Faktor pendorong dalam menangani WRSE yaitu adanya sarana prasarana yang memadai, kinerja pekerja sosial yang baik dan adanya kerjasama dengan instansi lainnya. Sedangkan factor penghambatnya yaitu terbatasnya jumlah anggaran, kurangnya jumlah pekerja sosial, kurangnya minat dan konsentrasi WRSE, WRSE memiliki suasana hati yang tidak stabil dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Kata kunci: Peran, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

#### ABSTRACT

*This research aimed to describe The Role of Woman Protection and Social Rehabilitation House Yogyakarta in handling WRSE along with the driving factors and inhibiting factor. This research was a descriptive qualitative research. The result of this research shows that the role of BPRSW Yogyakarta in handling WRSE is done by providing social protection and social rehabilitation. Social protection is done by considering who may visit, limiting visiting hours, determining the place visit, controlling the use of handphone and confidentiality of WRSE identity. The roles in social rehabilitation are manifested in physical, mental, social and skills guidance. After completing the guidance, WRSE will conduct PBK (Praktek Belajar Kerja). BPRSW Yogyakarta has an advanced guidance program, namely a certification program for BPRSW Yogyakarta's alumni. The driving factor in handling WRSE is the existence of adequate infrastructure, the perfomance of good social workers and cooperation with other instances. While the inhibiting factor are the limited budget amount, lack of social workers, lack of interest and concentration in WRSE, WRSE has an unstable mood and lack of the support from family and society.*

*Keywords: Role, Protection and Social Rehabilitation, Socio-Economic Vulnerable Woman*

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harapan dapat hidup sejahtera. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan yang sejahtera merupakan impian dan dambaan dari setiap manusia yang ada di dunia ini. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang sejahtera.

Kesejahteraan sosial yaitu suatu kondisi terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat baik itu secara jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan sosial dapat terwujud apabila permasalahan sosial dapat teratasi dengan baik. Sayangnya, beberapa permasalahan sosial saat ini masih saja menyelimuti kehidupan masyarakat yang menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu mencapai kehidupan yang sejahtera. Masyarakat yang memiliki permasalahan dalam pencapaian kesejahteraan sosial dapat disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah PMKS yang cukup

banyak. Hingga tahun 2018, jumlah PMKS meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari Bapedda Jogjapro, jumlah PMKS pada tahun 2018 mencapai 659.848 orang. Salah satu PMKS yang memiliki jumlah cukup tinggi yaitu wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Pada tahun 2018, jumlah WRSE meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 12.405 menjadi 12.454 orang.

Menurut Permensos RI No 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mendefinisikan WRSE sebagai seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Banyak faktor yang menyebabkan wanita menjadi WRSE diantaranya yaitu wanita dengan latar belakang keluarga ekonomi miskin, tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki keterampilan yang memadai, wanita tidak bekerja, dan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Banyaknya jumlah WRSE tersebut tentunya membutuhkan suatu usaha yang terarah, terpadu dan berkelanjutan baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk

menangani permasalahan WRSE. Dengan adanya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan munculnya organisasi-organisasi sosial yang turut berpartisipasi dalam penanganan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Organisasi yang ada di Indonesia memiliki sumbangsih dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah baik itu pusat maupun daerah bahkan memiliki organisasi-organisasi formal yang sengaja didirikan untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu organisasi milik pemerintah yaitu instansi sosial. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu instansi sosial yang ada di wilayah pemerintah daerah Yogyakarta. Dinas Sosial Yogyakarta memiliki tugas untuk memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah DIY.

Dinas Sosial Yogyakarta memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) salah satunya yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta memiliki peran dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya

yaitu wanita. Wanita yang mendapat pelayanan di BPRSW Yogyakarta salah satunya yaitu WRSE. Dalam balai tersebut, WRSE akan mendapatkan *treatment* dan pelayanan yang sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengentaskan WRSE dari masalah kesejahteraan sosial.

WRSE dirasa cukup menarik untuk dikaji lebih dalam karena peneliti melihat bahwa saat ini masih terdapat banyak wanita yang belum mampu mencapai tingkat kesejahteraan. Sedangkan alasan peneliti memilih Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta sebagai lokasi penelitian yaitu karena balai tersebut merupakan salah satu tempat yang memberikan penanganan bagi WRSE yang berlokasi di Yogyakarta dan BPRSW Yogyakarta juga cukup responsif dalam memberikan pelayanan bagi wanita-wanita PMKS salah satunya yaitu WRSE. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran dari BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Teori Peran Organisasi**

Kahn (dalam Agusti, 2009: 42) mengemukakan bahwa teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Salah satu perspektif dari teori peran yaitu teori

peran organisasi. Teori peran organisasi fokus pada cara individu menerima dan melakukan serangkaian peran dalam sistem berorientasi tugas dan hierarkis (dalam Biddle, 1986: 73).

Wickham dan Parker (2007: 7-11) mengemukakan bahwa dalam teori peran organisasi terdapat empat asumsi dasar diantaranya yaitu pengambilan peran, konsensus peran, kepatuhan peran dan konflik peran. Pada intinya, teori peran organisasi merupakan suatu teori yang mengkaji tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu sebagai hasil dari penerimaan serangkaian peran dalam sistem berorientasi tugas dan hierarkis sesuai dengan status yang dimiliki.

## **2. Kajian Kerentanan Sosial Ekonomi (Socio-Economic Vulnerable)**

Neil Adger (dalam Agustian, 2018: 17) menyatakan bahwa kerentanan merupakan keadaan berisiko terhadap hal yang merugikan serta berhubungan dengan perubahan lingkungan dan sosial yang disebabkan karena tidak adanya kemampuan untuk beradaptasi. Riyadi (dalam Agustian, 2018:18) juga mendefinisikan kerentanan (*vulnerability*) sebagai sekumpulan kondisi yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi baik fisik, sosial, ekonomi dan perilaku yang berpengaruh buruk.

Kajian mengenai kerentanan (*vulnerability*) salah satunya digunakan

untuk mengkaji mengenai kerentanan sosial ekonomi yang dialami masyarakat. Agustian (2008:19) menjelaskan bahwa kerentanan sosial ekonomi berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok orang dalam menanggulangi, bertahan dan pulih dari dampak kejadian bencana. Kerentanan sosial ekonomi sering dihadapi oleh orang miskin. Antonio (dalam Agustian, 2018:19) mengungkapkan bahwa orang miskin selalu rentan dan bahkan menjadi korban utama lahirnya kebijakan yang bermasalah, bencana alam yang bertubi-tubi, ketidakpastian musim dan cuaca, kekeringan, gagal panen dan seterusnya.

Kerentanan sosial ekonomi dapat dilatarbelakangi oleh risiko yang berupa pendidikan, kesehatan, politik, hukum, kelembagaan, penghasilan dan pendidikan. Kerentanan sosial ekonomi dapat diminimalkan dengan melakukan pengurangan risiko yang menjadi penyebab kerentanan tersebut. Selain itu, dalam pengurangan risiko juga diperlukan kebijakan dan lembaga yang tepat untuk membantu suatu negara untuk mengatasi kerentanan.

## **3. Kajian Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan**

Setiadi & Usman (2011: 287) memberikan penjelasan mengenai lembaga

kemasyarakatan sebagai himpunan norma-norma disegala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, lembaga sosial kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. BPRSW Yogyakarta termasuk salah satu wujud lembaga kemasyarakatan yang berbentuk balai.

BPRSW Yogyakarta didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dengan cara memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial khususnya kepada wanita. BPRSW Yogyakarta dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe lembaga sosial kemasyarakatan. Yang pertama, BPRSW Yogyakarta masuk ke dalam tipe *enacted institution* yaitu lembaga yang sengaja dibentuk untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini BPRSW Yogyakarta sengaja dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi wanita-wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial

Yang kedua, BPRSW Yogyakarta termasuk dalam tipe lembaga *approved/socially sanctioned institution* yaitu lembaga yang keberadaannya diterima dan diakui oleh masyarakat karena mampu memberikan pengaruh dan manfaat yang positif bagi masyarakat. BPRSW Yogyakarta diterima oleh

masyarakat sebab keberadaannya memberikan manfaat dan dampak yang positif yaitu membantu dalam mengatasi wanita-wanita yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial sehingga nantinya mampu melaksanakan fungsi sosialnya seperti sediakala.

Yang ketiga, BPRSW Yogyakarta termasuk dalam tipe lembaga *restricted institutions* yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan kepentingan kelompok, kelas atau golongan tertentu sehingga membangun suatu ciri khas dan tidak dapat diterapkan pada golongan, kelompok atau kelas lain. BPRSW Yogyakarta didirikan khusus untuk menangani wanita yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial saja sehingga tidak diperuntukan untuk seluruh kelompok masyarakat secara umum.

#### **4. Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

##### **a. Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Saat ini masih terdapat masyarakat yang mengalami permasalahan sosial kaitannya dalam pencapaian taraf hidup sejahtera atau sering disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Menurut Permensos RI No 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, penyandang

masalah kesejahteraan sosial merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung contohnya yaitu terjadinya bencana alam. Menurut Permensos RI No 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat digolongkan menjadi 26 jenis salah satunya yaitu WRSE.

#### **b. Wanita Rawan Sosial Ekonomi**

WRSE merupakan salah satu dari 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah diklasifikasikan oleh Kemensos RI. Menurut Permensos RI No 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, WRSE didefinisikan sebagai seorang wanita dewasa baik itu berstatus sudah menikah, belum menikah ataupun janda yang tidak

mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurut peraturan tersebut, terdapat beberapa kriteria wanita dapat disebut sebagai WRSE diantaranya yaitu perempuan berusia 18 sampai 59 tahun, istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan, menjadi pencari nafkah utama keluarga, berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. Selain itu penyebab wanita menjadi WRSE yaitu karena memiliki latar belakang ekonomi keluarga miskin dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga kemampuan yang dimiliki terbatas.

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta yang beralamat di Dusun Cokrobedog, Sidoarum, Godean, DIY. Peneliti memilih lokasi tersebut karena BPRSW merupakan salah satu balai yang menangani WRSE.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dimulai pada Bulan Februari-April 2019.

#### **3. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

#### 4. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian yang dipilih yaitu Kepala BPRSW Yogyakarta, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, instruktur keterampilan dan WRSE.

#### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 12 informan dan observasi sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku profil BPRSW Yogyakarta, dokumen atau arsip dan foto-foto kegiatan yang ada di BPRSW Yogyakarta.

#### 6. Teknik dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini, peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara namun

peneliti juga dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan respon yang diberikan informan.

##### b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan melihat langsung fenomena yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi non partisipatoris. Artinya, peneliti hanya mengamati aktivitas yang ada di BPRSW Yogyakarta tanpa terlibat langsung didalamnya.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan buku profil, arsip-arsip serta foto-foto kegiatan yang dilakukan di BPRSW Yogyakarta.

#### 7. Validitas dan Reabilitas Data

Validitas dan reabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi sumber. Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa teknik triangulasi sumber yaitu teknik pengecekan data dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat penelitian.

## **8. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta dalam Menangani Wanita Rawan Sosial Ekonomi**

BPRSW Yogyakarta merupakan salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang berbentuk balai atau panti sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRSW Yogyakarta berperan dalam mengentaskan wanita-wanita rawan sosial psikologis salah satunya yaitu WRSE. WRSE dapat dikategorikan sebagai individu yang mengalami kerentanan sosial ekonomi dalam kehidupannya. WRSE terjadi sebagai salah satu perwujudan sebuah risiko yang didapatkan karena gagal dalam beradaptasi dan menghadapi berbagai gangguan.

Gangguan yang paling mendasar disebabkan karena faktor ekonomi yaitu kemiskinan. Dari gangguan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya gangguan lainnya yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan juga terbatasnya keterampilan atau skill yang dimiliki. Neil Adger (dalam Agustian, 2018: 17) menjelaskan bahwa kerentanan merupakan

keadaan berisiko terhadap hal yang merugikan serta berhubungan dengan perubahan lingkungan dan sosial yang disebabkan karena tidak adanya kemampuan untuk beradaptasi.

Kegagalan wanita dalam menghadapi gangguan seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan juga terbatasnya keterampilan yang mereka miliki menuntun wanita menjadi WRSE. Wanita yang sebelumnya memiliki latar belakang ekonomi yang miskin karena gagal dalam beradaptasi justru akan terjatuh kedalam jurang kemiskinan untuk kedua kalinya. Semakin miskin seseorang maka mereka akan semakin rentan untuk mengalami kerentanan sosial ekonomi. Hal ini seperti yang dijelaskan Antonio (dalam Agustian, 2018:19) bahwa kerentanan sosial ekonomi sering dihadapi oleh orang miskin.

Kerentanan sosial ekonomi tidak dapat benar-benar dihilangkan namun dapat dikurangi dengan beberapa usaha yang dilakukan baik dari individu, keluarga, masyarakat ataupun institusi sosial. BPRSW Yogyakarta tergolong lembaga sosial yang turut berkontribusi dalam mengurangi risiko dari adanya kerentanan sosial ekonomi. BPRSW Yogyakarta memiliki peran dalam mengentaskan WTSE sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya seperti sediakala.



BPRSW Yogyakarta juga berperan untuk mempersiapkan WRSE agar lebih mandiri dan memiliki perilaku serta mental yang kuat. Dalam menangani WRSE, BPRSW Yogyakarta memiliki jangka waktu pelayanan yaitu maksimal satu tahun. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa waktu pelayanan yang diberikan melebihi batas waktu yang ada karena lama atau tidaknya WRSE mendapatkan penanganan disesuaikan dengan perkembangan yang mereka alami.

Peran BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE dilakukan dengan memberikan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan program perlindungan dan rehabilitasi sosial sebagai wujud peran dari BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE dilaksanakan oleh orang-orang yang menempati posisi jabatan di balai diantaranya yaitu Kepala BPRSW Yogyakarta, Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, instruktur keterampilan dan individu lainnya yang berkaitan dengan program penanganan.

Setiap individu yang menempati jabatan di BPRSW Yogyakarta dalam melaksanakan perannya sesuai dengan status jabatan yang mereka miliki. Pelaksanaan peran individu-individu di BPRSW Yogyakarta dapat dianalisis dengan teori peran organisasi. Bidle

(1986:73) mengungkapkan bahwa teori peran organisasi fokus pada cara individu menerima dan melakukan serangkaian peran dalam sistem berorientasi tugas dan hierarkis. Dalam lingkungan BPRSW Yogyakarta, masing-masing individu yang memegang jabatan akan memiliki uraian tugas setelah mereka menempati jabatan di BPRSW Yogyakarta. Tugas-tugas tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sehingga tujuan dari BPRSW Yogyakarta dapat tercapai. Uraian tugas tersebut sebenarnya juga merupakan patokan atau pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan perannya. Jadi mereka dalam melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai wujud peran BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE:

#### A. Peran Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial sangat dibutuhkan WRSE sehingga mereka merasa aman dari kondisi yang merugikan diri mereka. Peran dalam perlindungan sosial salah satunya berkaitan dengan kunjungan. BPRSW Yogyakarta berusaha menjauhkan WRSE dari pihak-pihak yang dirasa merugikan bagi diri mereka. Oleh karena itu, BPRSW Yogyakarta senantiasa mempertimbangkan siapa saja yang boleh berkunjung, membatasi jam kunjung dan menentukan tempat kunjung. Selain itu,

wujud peran dalam perlindungan sosial juga dilakukan dengan melakukan kontrol dalam penggunaan HP dan memberikan jaminan akan kerahasiaan identitas WRSE.

#### B. Peran Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial WRSE sehingga dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat seperti sedia kala. Peran dalam rehabilitasi sosial diwujudkan dalam beberapa program sebagai berikut:

##### 1) Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik diberikan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dari WRSE sehingga mereka mampu untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Bimbingan fisik diwujudkan dalam kegiatan senam SKJ, penyuluhan kesehatan dan cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh puskesmas Godean, serta penyuluhan mengenai kesehatan alat reproduksi.

##### 2) Bimbingan Mental

Bimbingan mental dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mental maupun sikap WRSE sehingga mereka memiliki mental yang kuat dan dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Bimbingan mental diwujudkan dalam pendalaman agama, layanan konsultasi psikologis,

penguatan budi pekerti dan pendampingan oleh pekerja sosial.

##### 3) Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian WRSE terhadap realitas yang ada dalam masyarakat sehingga ketika sudah kembali ke masyarakat dapat berinteraksi dengan baik. Bentuk bimbingan sosial yaitu penyuluhan mengenai kedisiplinan dan kesadaran hukum, pembelajaran mengenai dinamika kelompok, pembelajaran bahasa Jawa, bahasa Inggris, bimbingan seni musik atau suara, kesenian karawitan dan seni tari.

##### 4) Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan diberikan dengan tujuan untuk membekali WRSE dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Bimbingan keterampilan diantaranya yaitu bimbingan keterampilan batik, keterampilan jahit, keterampilan salon dan keterampilan olahan pangan.

Setelah mengikuti bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan selama 12 bulan dan dinyatakan sudah mengalami perkembangan yang baik maka WRSE selanjutnya akan mengikuti PBK (Praktik Belajar Kerja). PBK dilaksanakan selama kurang lebih 25 hari. Setelah

selesai mengikuti PBK, WRSE dinyatakan lulus dari BPRSW Yogyakarta.

#### 5) Bimbingan Lanjut

Program bimbingan lanjut diperuntukkan bagi alumni BPRSW Yogyakarta. Setelah menjadi alumni, selang setengah tahun pekerja sosial akan memantau WRSE untuk melihat apakah mereka masih konsen bekerja sesuai bidang keterampilan yang dipelajari selama di BPRSW Yogyakarta atau tidak. WRSE yang masih konsen bekerja sesuai bidang akan diseleksi dan dipanggil untuk mengikuti program sertifikasi selama 25 hari. Setelah selesai mengikuti program sertifikasi, WRSE akan mendapatkan sertifikat kerja dan mendapatkan bantuan berupa alat-alat sesuai dengan keterampilan yang mereka ikuti.

## **2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Menangani Wanita Rawan Sosial Ekonomi**

### a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan suatu kondisi yang dapat mendukung BPRSW Yogyakarta dalam pelaksanaan perannya untuk menangani WRSE.

#### 1) Sarana Prasarana yang Memadai

Sarana prasarana merupakan komponen yang dapat menunjang dan mendukung

pelaksanaan suatu program. Sarana prasarana yang berupa peralatan, benda maupun gedung yang ada di BPRSW Yogyakarta sudah memadai. Sarana prasarana tersebut cukup mendukung pelaksanaan program baik itu bimbingan fisik, sosial, mental maupun keterampilan. Ketika bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam bimbingan keterampilan habis, BPRSW Yogyakarta selalu berusaha untuk menyediakan lagi.

#### 2) Kinerja Pekerja Sosial yang Baik

Pekerja sosial memegang peranan penting bagi BPRSW dalam pelaksanaan perannya untuk menangani WRSE. Pekerja sosial merupakan sosok yang paling berperan dan paling dekat dengan WRSE. Kinerja pekerja sosial yang ada di BPRSW Yogyakarta cukup baik sebab pekerja sosial sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pekerja sosial telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh BPRSW Yogyakarta. Selain itu, kerjasama antar pekerja sosial terjalin dengan cukup erat sehingga ketika terdapat pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh salah

seorang pekerja sosial maka pekerja sosial yang lain akan berusaha untuk menggantikannya. Pekerja sosial juga senantiasa bekerja sama ketika terdapat pekerjaan yang memang tidak bisa ditangani oleh satu pekerja sosial saja

3) Adanya Kerjasama dengan Instansi Lain  
BPRSW Yogyakarta melakukan kerja sama dengan lembaga maupun instansi lainnya guna mendukung pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan yang dimiliki dapat tercapai. Kerjasama yang dilakukan dimulai sejak awal penerimaan WRSE menjadi warga binaan di BPRSW Yogyakarta. Dalam pelaksanaan bimbingan keterampilan, BPRSW Yogyakarta menjalin kerjasama terkait instruktur keterampilan. Selain itu, BPRSW Yogyakarta juga melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan guna mendukung pelaksanaan program PBK dan sertifikasi.

#### b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan suatu kondisi atau keadaan yang dapat menghalangi maupun merintangi BPRSW Yogyakarta dalam melaksanakan perannya untuk menangani WRSE.

#### 1) Terbatasnya Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran BPRSW Yogyakarta cukup terbatas. Hal itu karena sumber anggaran BPRSW Yogyakarta hanya berasal dari APBD DIY yang mana jumlahnya juga terbatas. Terlebih lagi, BPRSW Yogyakarta tidak memungut biaya sepeserpun dari WRSE yang mendapatkan penanganan. Terbatasnya jumlah anggaran berimbas pada terhambatnya peningkatan sarana prasarana dan juga pemenuhan kebutuhan lainnya.

#### 2) Kurangnya Jumlah Pekerja Sosial

Jumlah pekerja sosial tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan klien yang harus ditangani oleh BPRSW Yogyakarta. Saat ini hanya terdapat empat pekerja sosial sedangkan jumlah keseluruhan klien sebanyak 60 orang. Apabila dihitung, satu pekerja sosial memiliki anak asuh 15 orang. Jumlah tersebut tidak ideal karena menurut Kemensos satu pekerja sosial hanya memiliki anak asuh 5 orang saja.

Selain itu jumlah pekerja sosial laki-laki yaitu 3 orang sedangkan pekerja sosial wanita hanya 1 orang. Sementara, sasaran BPRSW Yogyakarta yaitu wanita

yang mengalami permasalahan sosial. Pekerja sosial laki-laki tidak bisa secara intens memberikan dampingan maupun penanganan khususnya yang berhubungan dengan masalah kewanitaan. Sebab tingkat pengetahuan mengenai kewanitaan antara pekerja sosial laki-laki dengan pekerja sosial wanita akan jauh berbeda. Pekerja sosial laki-laki juga akan merasa canggung ketika menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan.

3) Kurangnya Minat dan Konsentrasi WRSE

Kurangnya konsentrasi WRSE ketika mengikuti kegiatan salah satunya karena klien tersebut memiliki anak yang masih bayi. Jadi konsentrasi mereka terpecah menjadi dua antara mengasuh anak dan mengikuti kegiatan. Selain itu, tingkat permasalahan yang dimiliki WRSE turut mempengaruhi tingkat konsentrasi mereka. WRSE yang memiliki tingkat permasalahan yang berat maka dirinya akan kesulitan untuk berkonsentrasi.

Sementara itu, kurangnya minat WRSE disebabkan karena keberadaan mereka di BPRSW Yogyakarta bukan karena kemauan sendiri melainkan hasil rujukan

keluarga maupun masyarakat. Jadi ada rasa terpaksa ketika berada di BPRSW Yogyakarta.

4) WRSE Memiliki Suasana Hati yang Tidak Stabil

Suasana hati yang tidak stabil menyebabkan emosi WRSE naik turun dan cenderung sensitif. Ketika suasana hati WRSE sedang tidak baik, mereka cenderung malas untuk mengikuti program kegiatan terutama bimbingan keterampilan. Selain itu, suasana hati WRSE yang tidak stabil menyebabkan mereka memiliki emosi yang tinggi. Ketika emosi WRSE memuncak, terkadang mereka melampiaskannya dengan cara merusak fasilitas yang ada.

Beberapa WRSE terkadang juga salah mengartikan perhatian yang diberikan oleh pekerja sosial. WRSE beranggapan bahwa pekerja sosial tersebut jatuh hati kepada mereka. Hal itu tentu menyebabkan pekerja sosial laki-laki sedikit menjaga jarak dengan WRSE sehingga penanganan yang diberikan menjadi kurang maksimal.

5) Kurangnya Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat

Beberapa pihak keluarga dari WRSE kurang memberikan

dukungan ketika salah satu anggota keluarganya ditangani di BPRSW Yogyakarta. Keluarga cenderung acuh tak acuh dengan keadaan anggota keluarga. Dengan tidak adanya dukungan dari keluarga maka menyebabkan WRSE merasa bahwa mereka tidak diperhatikan dan dihargai oleh keluarganya. Mereka merasa bahwa usaha mereka untuk pulih hanya sia-sia karena keluarga tidak mendukung mereka untuk sembuh.

Selain itu, masyarakat juga kurang peduli dengan keberadaan anggota masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan cenderung menutup-nutupi sebab dianggap sebagai aib dalam masyarakatnya. Hal tersebut menyebabkan BPRSW Yogyakarta tidak dapat melakukan penjangkauan secara maksimal sebab data-data wanita yang mengalami permasalahan sosial tidak dapat diketahui dengan sebenar-benarnya. Kondisi tersebut tentu menjadi penghambat BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Peran BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE dilakukan dengan

memberikan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial. Peran BPRSW Yogyakarta dalam perlindungan sosial dilakukan dengan menentukan siapa saja yang boleh berkunjung, membatasi jam kunjung, menentukan tempat kunjung, kontrol dalam penggunaan HP dan jaminan akan kerahasiaan identitas WRSE. Sedangkan peran BPRSW Yogyakarta dalam rehabilitasi sosial dilakukan dengan memberikan beberapa program bimbingan diantaranya yaitu bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan.

Setelah WRSE dinyatakan kuat secara fisik, mental dan keterampilan maka selanjutnya mereka akan mengikuti PBK (Praktik Belajar Kerja) selama 25 hari. WRSE akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk bekerja di beberapa tempat usaha sesuai dengan keterampilan yang mereka ikuti. WRSE yang telah melaksanakan PBK dianggap lulus dan menjadi alumni BPRSW Yogyakarta.

BPRSW Yogyakarta juga memiliki program bimbingan lanjut bagi alumni yang masih konsen bekerja sesuai bidang keterampilannya yaitu program sertifikasi. Setelah mengikuti program sertifikasi, WRSE akan mendapatkan sertifikat kerja dan bantuan berupa satu set peralatan sesuai bidang keterampilan masing-masing.

Faktor pendorong dalam menangani WRSE diantaranya yaitu

adanya sarana prasarana yang memadai, kinerja pekerja sosial yang baik dan adanya kerjasama dengan instansi lainnya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya jumlah anggaran, kurangnya jumlah pekerja sosial, kurangnya minat dan konsentrasi WRSE, WRSE memiliki suasana hati yang tidak stabil dan kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menangani WRSE yaitu sebagai berikut:

### **a. Bagi BPRSW Yogyakarta**

- 1) Dalam menyikapi terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh BPRSW Yogyakarta dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang berkaitan dengan penanganan WRSE.
- 2) BPRSW Yogyakarta perlu melakukan pendekatan lebih dalam kepada masyarakat sehingga masyarakat mendukung dan dapat lebih mengerti kebermanfaatan program yang ada di BPRSW Yogyakarta yang digunakan untuk menangani WRSE.
- 3) Diperlukan adanya inovasi yang baru bagi BPRSW Yogyakarta

dalam melakukan penjangkauan misalnya dengan menyebarkan informasi melalui media sosial yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat.

- 4) Alangkah lebih baik apabila BPRSW Yogyakarta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti yang melakukan penelitian di BPRSW Yogyakarta sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal.

### **b. Bagi Masyarakat**

- 1) Masyarakat diharapkan lebih peduli dengan kondisi anggota masyarakatnya yang mengalami permasalahan social dan membutuhkan penanganan dari BPRSW Yogyakarta.
- 2) Masyarakat diharapkan lebih mendukung dan turut serta dalam menyebarkan informasi mengenai BPRSW Yogyakarta.

### **c. Bagi Peneliti**

- 1) Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian lanjutan mengenai peran BPRSW Yogyakarta dalam menangani WRSE diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di penelitian ini dan dapat mengembangkan dalam sudut pandang keilmuan yang lainnya.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Reza. 2018. *Kerentanan Sosial-Ekonomi (Socio-Economic Vulnerability) Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang Blok G)*. Skripsi S1. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bappeda Jogjaprov. 2019. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial*. *Bappeda.jogjaprov.go.id*. Diakses pada 1 Desember 2018 pukul 16:51 WIB, melalui: [http://bappeda.jogjaprov.go.id/data\\_ku/data\\_dasar/index/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial?id\\_skpd=5](http://bappeda.jogjaprov.go.id/data_ku/data_dasar/index/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial?id_skpd=5).
- Biddle, B.J. 1986. Recent Developments in Role Theory, *Annual Review of Sociology*, Vol 12: 67-92.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dinardo, Donny. 2017. *Peran Pekerja Sosial dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fajarwati, Alia, Eva Latifah P.S dan Nirania G.P.S. 2017. Strategi untuk Mengatasi Permasalahan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). *Majalah Geografi Indonesia*, Vol 31 No 1 : 22-30.
- Gubernur DIY. 2015. Peraturan Gubernur DIY Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.
- Habibi, Marbruno dan Imam Buchori. 2013. Model Spasial Kerentanan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan terhadap Bencana Gunung Merapi. *Jurnal Teknik PWK*, Vol 2 No 1: 1-10.
- Kemensos RI. 2018. Instansi Sosial. [kemensos.go.id](https://www.kemensos.go.id). Diakses pada Senin, 24 Desember 2018 pukul 15:51 WIB, melalui: <https://www.kemensos.go.id/content/instansi-sosial>
- Lubis, Nurhayani. 2018. Coping Strategy Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Kampung Adat Cijere, Rancakalong, Sumedang. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol 17 No 1: 37-54.
- Martanti, Noor Fitriana. 2017. *Upaya Menumbuhkan Minat Berwirausaha Warga Binaan Melalui Program Bimbingan Keterampilan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Arni. 2015. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Musdalifah. 2015. Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 No 2: 718-730.
- Naudé, Wim dkk. 2018. Vulnerability in Developing Countries. *Research Brief*. Japan: United Nations University.



- Nurfaal, Abdul Rohman. 2017. Penyelenggaraan Program Pelatihan Tata Busanadi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol 6 No 2: 208-219.
- Permensos. 2012. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Prasetyo, Anggadan Marsono. 2011. Pengaruh *Role Ambiguity* dan *Role Conflict* terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol 7 No 2: 147-163.
- Presiden RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Putranto, Picta Dhody. 2010. *Peran Balai Perumahan dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal di Balai Perumahan Surakarta*. Skripsi S1. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Ramadhani, Widya Suci, Sri Sulastri, dan Soni Akhmad Nurhaqim. 2017. Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon, *Jurnal Penelitian dan PKM*, Vol 2 No 2: 129-389.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2011. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemcahannya*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sufiyana, Feni Yuwan. 2013. Peran Pekerja Sosial dalam Peningkatan Kualitas Hidup Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Mardi Utomo Semarang. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, Vol 2 No 2: 51-55.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharsimi, A. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wickham, Mark and Parker Melissa. 2007. Reconceptualising Organisational Role Theory for Contemporary Organisation Contexts. *Journal of Managerial Psychology*, Vol 22 No 5: 440-464.
- Yuniarti, Riska. 2017. *Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta*. Skripsi S1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.